

DAFTAR BACAAN

A. UNDANG UNDANG (UU)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang Kewenangan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

B. BUKU

Ali, H. Z. (2023). *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika.

Ariyanto, A. (2022). *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Prenada Media.

Dwi Rizkia, N., Fardiansyah, M. H., & Jaelani, E. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Freepik.

- Fauzan, R. (2022). *Rekonstruksi Peradilan Indonesia dalam Bayang-Bayang Korupsi*. Pena Cendekia.
- Fitriani, D. (2021). *Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Kritis*. Genta Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Handayani, S. (2021). *Peran Komisi Yudisial dalam Membentuk Peradilan Bersih*. CV Aksara Indonesia.
- Hasan, M. (2023). *Hukum Acara Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial*. Nuansa Cendekia.
- Hartanti, E. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Ismail, R. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Perilaku Hakim yang Melanggar Etika*. CV Widina Bhakti Persada.
- Khasanofa, A., Haq, S., Enawar, D., Ahmad, D. N. F., Kadir, A., Albab, U., Razif, I. B., & Arwen, D. H. (2025). *Buku Panduan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Kurniawan, B. (2022). *Strategi Penegakan Hukum Anti Korupsi di Lembaga Peradilan*. Pilar Nusantara.
- Lubis, T. M. (2022). *Hukum, Etika, dan Reformasi Peradilan di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Nurhadi, S., & Maulidiyah, N. (2023). *Etika dan Integritas Hakim dalam Perspektif Hukum*. Setara Press.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Genta Press.
- Saragih, B. (2023). *Tanggung Jawab Profesi Hakim: Dimensi Hukum dan Moral*. Nusa Media.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sumarna, A., & Adiwarmanto, R. (2021). *Pengawasan Kekuasaan Kehakiman di Negara Hukum Indonesia*. Prenada Media.
- Susanto, E., & Firmansyah, R. (2023). *Sistem Integritas Peradilan di Indonesia: Tinjauan Empiris*. Litera Pustaka.
- Wahyudi, J. (2023). *Penguatan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Rajawali Pers.

- Wicaksana, Y. (2023). *Kelembagaan Komisi Yudisial: Antara Harapan dan Realitas*. Alqolam Institute.
- Yosua, M. F., & Fransiscus, B. (2023). *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Studi di Kota Makassar*. Deepublish.
- Yuliana, R. (2024). *Evaluasi Etik dan Disiplin Hakim di Indonesia: Perspektif Komparatif*. Widya Prakarsa.

C. JURNAL

- Aini Safa, R., & Azzura Putri Ananda, G. (2024). Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).
- Alexander, A. (2023). Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Research*, 1(1). <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>
- Andiyani, A. R., & Ismunarno. (2021). Perbandingan Hukum Jenis Perbuatan yang Dilarang dalam Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dan Singapura. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(1), 29. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58846>
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Research*, 1(1). <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>
- Asrun, A. M. (2023). Judicial Corruption as a Violation of Professional Ethics. *Brazilian Journal of Business Review*, 8(2). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i2.1125>
- Dimas Yemahura Alfarauq, S., Marwiyah, S., & Prawesthi, W. (2025). Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga Perilaku Hakim. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 1–21. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i2.660>
- Dina Yanti Hasibuan. (2022). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Revisi UU No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Dyah Kuntorini Dwi Angreni, Rizki, A., & Satria, O. (2022). Building Capacity dalam Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN*, 10(2), 459–471. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.108>
- Edlin H. M. Mandak. (2020). Upaya Pemerintah pada Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Antikorupsi Indonesia*.

- Fadli, M. (2023). Praktik Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Indonesia dan Upaya Pencegahan Korupsi oleh Penegak Hukum di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(1). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>
- Faisa Rinto Adillah. (2025). Birokrasi dan Penyelenggaraan Negara Bebas Gratifikasi guna Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Felix Philep Mantiri, R., & Astutik, S. (2024). Penegakan Hukum bagi Pelaku terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(10).
- Gede Sujana, I., & Ana Pali, R. (2025). Keterbatasan Komisi Yudisial dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangan Berdasarkan UUD 1945. *Indonesian Journal of Law Research*, 1(1). <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>
- Hilmi Ardani Nasution. (2021). Penguatan Fungsi Komisi Yudisial dalam Amandemen UUD 1945. *Jurnal Ketatanegaraan*. <https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/>
- Jasmi, M., Patra, R., & Suasono, E. (2023). Melakukan Pengawasan Hakim di Indonesia. *Tanjungpura Legal Review*, 2(1).
- Juanda, & Ogiandhafiz Juanda. (2021). Membangun Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang Ideal. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 345–356. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.870>
- Kartikasari, D., Risky, S., Wiguna, J. K., & Ploso, K. (2025). The Idea of Independent Judicial Ethics Courts in Indonesia. *Jurnal Asia Pasifik Hukum Tata Negara*, 4(1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.156>
- Kholiq Hadi Rohman, S. H. (2024). Konstitusionalitas KPK sebagai Organ Konstitusi dalam UUD 1945. *Jurnal Konstitusi Indonesia*.
- Lorena Repayona Br Manik. (2021). Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim dan Pelaksanaan KEPPH. *Jurnal Hukum Nasional*.
- Mawardi, C., & Akhdloriy, A. A. (2024). Tantangan Modern dalam Menjaga Integritas Hakim: Mengatasi Ancaman terhadap Keluhuran Martabat Profesional. *Jatijajar Law Review*, 3(1), 15. <https://doi.org/10.26753/jlr.v3i1.1323>
- Mohd. Yusuf, D. M., et al. (2023). Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 5(1).
- Ni Luh Ariningsih Sari. (2022). Kewenangan Pengawasan dan Advokasi Komisi Yudisial terhadap Hakim berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011. *Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Riyasy Ishak, D., & Riswanih, I. (2021). Dasar Konstitusional dan Tugas Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*.

- Rokilah, F. A. E. B. (2025). Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Integritas Hakim Agung di Mahkamah Agung. *Jurnal Ketatanegaraan Indonesia*.
- Sandi Herintus Kabba, Arjaya, I. M., & Widyantara, M. M. (2022). Prosedur Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 68–74. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4237.68-74>
- Satjipto Rahardjo. (2020). Peran Hukum Progresif dalam Mencari Keadilan. *Nusantara Law Review*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.1111/nusantara.xxxxxxx>
- Suharsono, M. Z. H. P. T. N. J. (2023). Etika Profesi Hakim. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 53. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.121>
- Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B., Gozali, F., & Sianturi, D. M. R. (2024). Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas dan Akuntabel (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023). *IBLAM Law Review*, 4(2), 50–61. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>

D. ARTIKEL

- Akbar Bebe Lebu. (2024). Kedudukan dan Pembatasan Kewenangan Komisi Yudisial terhadap Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*.
- Amatahir, Z. (2021). Pengaruh Budaya Hukum terhadap Kebijakan Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.59414/jmh.v10i1.502>
- Asrun, A. M. (2023). Judicial Corruption as a Violation of Professional Ethics. *Brazilian Journal of Business Review*, 8(2). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i2.1125>
- Evania Tansir, C., Evelyn, & Rafael Christian Djaja, S. (2024). Peran Komisi Yudisial dalam Menegakkan Kode Etik Hakim: Analisis Kasus Hakim DA. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). <https://jhlgr.wangrengcang.com/>
- Hilmi, H. El, & Astuti, P. (2020). Pemenuhan Asas Terbuka untuk Umum dalam Persidangan Perkara Pidana secara Online. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*.
- Irvan Sebastian Iskandar. (2023). Konsepsi Gratifikasi sebagai Korupsi bagi Pejabat Publik. *Jurnal Antikorupsi Indonesia*.
- Muhammad, O., & Hr, A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1).

- Purbacaraka, P. (2021). Hukum sebagai Perangkat Sikap Tindak. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 5(3). <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol5/iss3/4>
- Rokilah, F. A. B. (2025). Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Integritas Hakim Agung di Mahkamah Agung. *Jurnal Ketatanegaraan Indonesia*.
- Sutiyoso, B. (2021). Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ketatanegaraan*, 18(2). <http://dimasprasidi.wordpress.com/2010/05/17/menggagas-kembali-peranan-komisi-yudisial/>

E. WEBSITE

- Komisi Yudisial. (2023). *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Komisi Yudisial. (2024a). *Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2024* [Laporan]. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Komisi Yudisial. (2024b). *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2024* (Issue 57). Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.